

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN



RENCANA STRATEGIS

2020-2024



STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUNA

#PILARPSDKP

Profesional Integritas Loyalitas inovAtif sineRgi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena oleh berkat dan anugerahNya sehingga rencana strategis (renstra) Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna tahun 2017-2019 dapat diselesaikan dengan baik.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri PPN / Kepala Bappenas Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Tahun 2020 - 2024 mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) sebagai penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hanya sampai dengan tingkat Kementerian/Lembaga (K/L). Namun di sisi lain, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan penyelenggaraan SAKIP pada entitas akuntabilitas kinerja di tingkat K/L, unit organisasi, serta satuan kerja yang salah satunya meliputi penyusunan Renstra sebagai landasan penyelenggaraan SAKIP. Oleh karena itu, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna melakukan penyusunan Renstra Stasiun PSDKP Tahuna tahun 2020-2024.

Renstra Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna tahun 2020-2024 merupakan penjabaran teknis berjenjang dari Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Direktorat Jenderal PSDKP dimana sesuai dengan tugas dan fungsi Stasiun PSDKP Tahuna sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis. Renstra 2020-2024, memiliki nilai strategis karena merupakan tahapan akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna berkomitmen untuk terus membangun Prestasi Aksi dan Prestasi Hasil melalui tugas, pokok dan fungsinya.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pegawai Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna yang terlibat dalam penyusunan rencana strategis ini. Kritik dan saran kami harapkan, untuk perbaikan kedepan dalam penyusunan rencana strategis sehingga informasi yang disajikan dapat lebih baik.

Tahuna, 24 September 2021

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber daya
Kelautan dan Perikanan Tahuna



JOHANIS J. MEDFA. S.St.Pi
NIP. 19850701 200901 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
BAB I	3
PENDAHULUAN	3
A. Kondisi Umum	3
B. Potensi dan Permasalahan	7
C. Lingkungan Strategis	12
BAB II	16
VISI, MISI, DAN TUJUAN	16
A. Visi, Misi dan Tujuan	16
B. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	17
BAB III	18
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	18
A. Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	18
B. Kebijakan Pengarusutamaan	19
C. Kerangka Regulasi Dan Kelembagaan	22
BAB IV.....	26
INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	26
A. Indikator Kinerja Program	26
B. Indikator Kinerja Kegiatan	29
C. Output Kegiatan dan Kerangka Pendanaan	30
BAB V	31
PENUTUP.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Visi Pembangunan 2005-2025 adalah Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur dengan sasaran pokok RPJMN ketiga (2015-2019) yaitu ; memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Pada periode RPJMN 2015-2019 ini pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan sebagai *prime mover* (penggerak utama) pembangunan nasional melalui 3 (tiga) pilar pembangunan kelautan dan perikanan, yakni: kedaulatan (*sovereignty*), keberlanjutan (*sustainability*) dan kesejahteraan (*prosperity*).

Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dilakukan secara optimal dengan memperhatikan tata kelola yang baik serta kelestarian lingkungan hidup dan perairan akan memberi hasil yang berdaya guna dan berhasil guna. Mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan harus dibarengi dengan penataan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya harus ada upaya penegakan hukum terhadap para pengelola yang melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku; hal ini wajib dilaksanakan agar cita-cita mewujudkan Negara Republik Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dapat tercapai.

Kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan Indonesia bebas illegal fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna bertugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan menyelenggarakan fungsi sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Per.33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, antara lain :

1. Penyusunan rencana, program dan evaluasi dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
4. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
5. Pelaksanaan dan evaluasi penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan

dan perikanan;

6. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan;
7. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengawasan kapal pengawas;
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Selain fungsi tersebut, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna beserta Satuan Pengawasan SDKP Kepulauan Talaud dan Wilker PSDKP melaksanakan beberapa pelayanan publik yang meliputi :

1. Pelayanan penerbitan Form Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) baik kedatangan maupun keberangkatan kapal perikanan (kapal penangkap/pengangkut ikan) dalam rangka penerbitan Surat Laik Operasi (SLO);
2. Pelayanan penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan;
3. Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) Online Kapal Perikanan.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis yang baru dibentuk tahun 2017, fungsi pelayanan tersebut tentu sejalan dengan persiapan sistem kinerja yang direncanakan dengan efektif seperti capaian kinerja tahun 2019 sebagaimana digambarkan pada Tabel 1 :

Perspektif/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target 1 Tahun	Capaian	%	Status
CUSTOMER				100,70	
SS 1. Terwujudnya Kedaulatan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan				100,70	
IK 1. Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa Kepatuhan nya terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Pelaku Usaha	72,00	73,00	101,39	
IK 2. Jumlah Pelaku Usaha Pemanfaat WP3K yang diperiksa Kepatuhan nya sesuai Peraturan Perundangan	Pelaku Usaha	12,00	12,00	100,00	
INTERNAL PROSES				104,21	
SS 2. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SDKP secara Profesional dan Partisipatif				104,21	

Perspektif/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target 1 Tahun	Capaian	%	Status
IK 3. Jumlah Hari Operasi Kapal Pengawas dalam rangka Pengawasan Kegiatan IUU Fishing dan Kegiatan yang Merusak SDKP di WPP-NRI lingkup UPT Stasiun PSDKP Tahuna	Hari	90,00	90,00	100,00	●
IK 4. Jumlah Kapal Pengawas yang Siap Operasi lingkup UPT Stasiun PSDKP Tahuna	Unit	1,00	1,00	100,00	●
IK 5. Jumlah Hari Operasi Speed Boat/RIB/Rubber Boat UPT Stasiun PSDKP Tahuna	Hari	40,00	40,00	100,00	●
IK 6. Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Disidik secara Akuntabel lingkup UPT Stasiun PSDKP Tahuna	Kasus	1,00	5,00	120,00	●
IK 7. Jumlah Barang Bukti dan Awak Kapal yang Selesai Ditangani secara Akuntabel lingkup UPT Stasiun PSDKP Tahuna	Kasus	1,00	5,00	120,00	●
SS 3. Tersedianya Infrastruktur Pengawasan SDKP dan Sistem Informasi dan Komunikasi Pengawasn SDKP				100,00	●
IK 8. Jumlah Pemenuhan Infrastruktur Pengawasan yang Memadai secara Akuntabel dan Tepat Waktu	Unit	1,00	1,00	100,00	●
LEARNING AND GROWTH				106,47	●
SS4. Terwujudnya ASN UPT Stasiun PSDKP Tahuna yang Kompeten, Profesional, Berkepribadian				88,76	●
IK 9. Indeks Profesionalitas Lingkup UPT Stasiun PSDKP Tahuna	Persen	71,00	63,02	88,76	●
SS5. Tersedianya Manajemen Pengetahuan UPT Stasiun PSDKP Tahuna yang Handal dan Mudah Diakses				115,63	●
IK 10. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup UPT Stasiun PSDKP Tahuna	Persen	80,00	80,00	115,63	●
SS6. Terwujudnya Birokrasi UPT Stasiun PSDKP Tahuna yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima				105,45	●

Perspektif/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target 1 Tahun	Capaian	%	Status
IK 11. Persentase Pemenuhan Dokumen RB Lingkup UPT Stasiun PSDKP Tahuna	Persen	100,00	100,00	100,00	●
IK 12. Level Maturitas SPIP Lingkup UPT Stasiun PSDKP Tahuna	Level	3,00	3,00	3,50	●
IK 13. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan	Persen	100,00	100,00	100,00	●
IK 14. Persentase Pemenuhan Dokumen AKIP Lingkup UPT Stasiun PSDKP Tahuna	Persen	100,00	100,00	100,00	●
SS7. Terkelolanya Anggaran Lingkup UPT Stasiun PSDKP Tahuna secara Efisien dan Akuntabel				116,04	●
IK 15. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun PSDKP Tahuna	Persen	87,00	99,23	114,06	●
IK 16. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP-BPK atas LK UPT Stasiun PSDKP Tahuna Dibandingkan Realisasi Anggaran UPT Stasiun PSDKP Tahuna TA 2018	Persen	1,00	0,01	120,00	●

Penjelasan warna: ● Baik (Skor >= 100) ● Hati-hati (80 <= Skor < 100) ● Buruk (Skor < 80) ○ BelumAda Skor

Seluruh IKU terknis tersebut pada periode Renstra 2015-2019 selalu tercapai pada setiap tahunnya. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan fungsi- fungsi berikut, yakni: pencegahan, pemantauan, pengawasan, dan penindakan di bidang kelautan dan perikanan. Fungsi pencegahan dilakukan melalui proses sosialisasi kepada masyarakat sekaligus melibatkan langsung melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Fungsi pemantauan dilakukan melalui berbagai media dan sarana, fungsi pengawasan dilakukan melalui aktivitas pemeriksaan kepatuhan para pelaku usaha kelautan dan perikanan oleh Pengawas Perikanan secara profesional. Sedangkan penindakan dilakukan melalui proses penyidikan dan penanganan barang bukti terhadap pelaku pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Seluruh fungsi tersebut berjalan sinergis dengan instansi penegak hukum lainnya. Di samping itu, kerja profesional dari seluruh elemen pada Stasiun PSDKP Tahuna, Satwas SDKP Talaud dan Wilayah Kerjanya juga memberi kontribusi positif terhadap capaian tersebut.

Berbagai upaya strategis dijalankan selama periode 2015-2019 sebagai langkah untuk mewujudkan sumber daya kelautan dan perikanan yang berdaulat dan berkelanjutan, serta masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dalam rangka mendukung Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

B. Potensi dan Permasalahan

1) Potensi

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau di Indonesia kurang lebih 17.504, dan yang sudah dibakukan dan didaftarkan ke PBB sejumlah 16.056 pulau. Luas perairan Indonesia adalah 6,4 juta km² yang terdiri dari luas laut teritorial 0,29 juta km², luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan 3,11 juta km² dan luas ZEE Indonesia 3,00 juta km². Selain itu, Indonesia memiliki luas Zona Tambahan perairan 0,27 juta km², luas landas kontinen 2,8 juta km² dan panjang garis pantai 108.000 km.

Sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan alam sangat besar dan beragam, baik berupa SDA terbarukan (perikanan, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, rumput laut dan produk bioteknologi), SDA tak terbarukan (minyak, gas bumi, timah, bijih besi, bauksit dan mineral lainnya), energi kelautan (seperti pasang-surut, gelombang, angin, OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion), maupun jasa-jasa lingkungan kelautan dan pulau-pulau kecil untuk pariwisata bahari, transportasi laut dan sumber keragaman hayati serta plasma nuftah. Kekayaan alam tersebut menjadi salah satu modal dasar yang harus dikelola dengan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai objek wilayah pengawasan Stasiun PSDKP Tahuna, terletak di antara 02°04'13" sampai 04°44'22" Lintang Utara dan 125°9'28" sampai 125°56'57" Bujur Timur. Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah daerah perbatasan juga disebut daerah Kepulauan karena terdiri dari pulau-pulau terbentang dari utara ke selatan dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Negara Filipina;
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Minahasa;
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi;
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Talaud dan Laut Maluku

Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan Daerah Maritim yang memiliki Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang cukup besar serta Potensial untuk dikelola guna kesejahteraan masyarakat. Sejalan dalam pengelolaan potensi yang ada, maka diperlukan suatu perencanaan yang baik dan matang dengan pendekatan yang

berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan budaya, berwawasan lingkungan, kemitraan dan anggaran berbasis kinerja.

Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, merupakan modal dasar bagi pembangunan ekonomi bangsa Indonesia secara khusus di Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui potensi yang dimiliki yang harus digali dan dimanfaatkan. Salah satu potensi unggulan dari sektor kelautan dan perikanan adalah sumberdaya ikan laut dengan jumlah potensi lestari mencapai 6,5 juta ton/tahun. Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan lainnya yang tak kalah penting antara lain: budidaya perikanan, pariwisata bahari, energi dan mineral, serta potensi lainnya. Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan harus dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan kelestariannya agar usaha perikanan dan kelautan dapat berlanjut.

Potensi dan permasalahan sumber daya kelautan dan perikanan antara lain menjelaskan beberapa informasi yang akan diterapkan dalam melaksanakan program kerja 5 tahun kedepan, yaitu :

1. Capaian kinerja pengawasan SDKP tahun 2015-2019;
2. Prioritas nasional untuk penanggulangan IUU Fishing;
3. Tersedianya regulasi pendukung bidang pengawasan SDKP;
4. Tumbuh kembangnya kearifan lokal (hukum adat) bidang Kelautan dan Perikanan;
5. Kewajiban pelaksanaan ketentuan internasional;
6. Kewajiban pelaksanaan ketentuan nasional;
7. Kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait yang terjalin dengan baik.

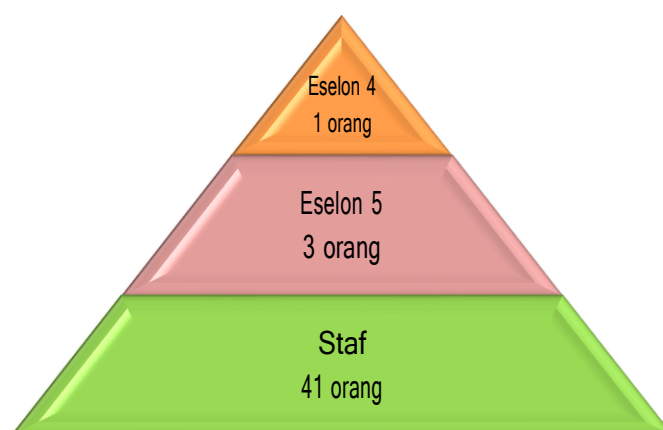
Seluruh potensi tersebut harus didukung dan dijadikan modal untuk keberhasilan tantangan dan permasalahan yang berat. Permasalahan yang dihadapi dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yaitu:

1. Kegiatan IUU fishing oleh Kapal Ikan Asing (KIA) dan Kapal Ikan Indonesia (KII) pemanfaatan.
2. Usaha penangkapan ikan dan budidaya perikanan tidak sesuai dengan ketentuan.
3. Pemanfaatan SDKP dengan cara merusak (destructive fishing).
4. Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan cara merusak dan tidak sesuai dengan ketentuan.
5. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawasan SDKP masih terbatas.
6. Sarana dan prasarana pengawasan SDKP terbatas.
7. Tata kelola pengawasan SKDP belum optimal
8. Teknologi informasi dan komunikasi pengawasan SDKP yang terintegrasi belum tersedia.
9. Wilayah kerja pengawasan SDKP belum jelas.

10. Penegakan hukum (law enforcement) belum konsisten
11. Sistem reward dan punishment belum diterapkan.
12. Pemberdayaan PPNS Perikanan, Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K belum optimal.

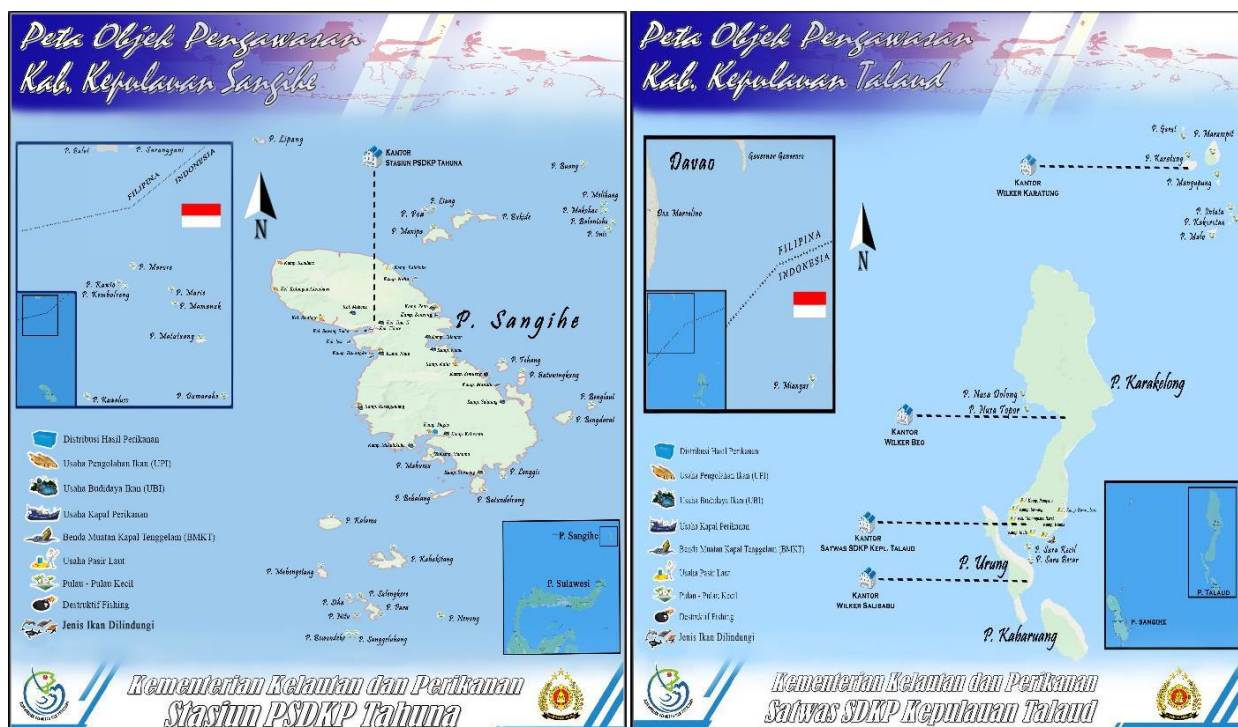
Setiap permasalahan tersebut tentu akan menghambat pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilapangan yang harus diselesaikan, untuk itu peran setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Ditjen PSDKP menjadi sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian dari seluruh elemen di Ditjen PSDKP.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan, Stasiun PSDKP Tahuna didukung oleh 45 (empat puluh lima) orang pegawai dengan rincian 31 (tiga puluh satu) Aparatur Sipil Negeri dan 14 (empat belas) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri. Dari jumlah tersebut, terdapat 5 (lima) ASN yang memiliki kewenangan khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 3 (tiga) ASN sebagai Polisi Khusus Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus WP3K). Sedangkan staf pelaksana terdiri dari 13 (tiga belas) Awak Kapal Pengawas (AKP) dan 24 (dua puluh empat) Pejabat Fungsional Umum.



Gambar 1. Komposisi Pegawai Stasiun PSDKP Tahuna

Dari segi kuantitas, tentu jumlah tersebut masih jauh dari cukup untuk mengawasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud. Kemudian dalam hal kompetensi, pada dasarnya seluruh ASN lingkup Stasiun PSDKP Tahuna telah memiliki kompetensi dasar sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing namun seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan dan tantangan di lingkungan strategis tentu peningkatan kompetensi ASN Stasiun PSDKP Tahuna secara terus menerus harus menjadi salah satu agenda utama sebagai modalitas yang menopang pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun PSDKP Tahuna.



Gambar 2. Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Tahuna

Wilayah kerja pengawasan, Stasiun PSDKP Tahuna membawahi 1 (satu) Satuan Pengawasan (Satwas) SDKP Kepulauan Talaud dan 3 (tiga) Wilayah Kerja (Wilker) PSDKP Salibabu, Beo dan Karatung di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Sarana dan prasarana Stasiun PSDKP Tahuna terdiri dari 1 (satu) unit Kapal Pengawas Perikanan 7 (tujuh) bangunan pengawasan yang terdiri dari : kantor Stasiun PSDKP Tahuna, kantor Satwas SDKP Talaud, kantor wilayah kerja Salibabu, bangunan pos jaga Satwas SDKP Talaud dan mess operator sebanyak 3 (tiga) unit.

Tabel 2. Rincian Sarana dan Prasarana Stasiun PSDKP Tahuna

NO	JENIS SARPRAS	UNIT
1	Kapal Pengawas Perikanan	3
	- Kapal Pengawas Hiu 15 (Tipe C)	1
	- Speedboat Pengawasan 017 (Bensin)	1
	- Speedboat Pengawasan 039 (Solar)	1
2	Bangunan PSDKP	7
	- Kantor Pengawasan PSDKP Tahuna	1
	- Kantor Satuan Pengawasan SDKP Talaud	1
	- Kantor Wilayah Kerja PSDKP Talaud	1
	- Pos Jaga Satwas PSDKP Talaud	1
	- Mess Operator	3

Peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) juga sangat vital dan strategis. Keberadaan Pokmaswas di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud menjadi salah satu solusi atas terbatasnya SDM Aparatur Stasiun PSDKP Tahuna karena pada hakikatnya Pokmaswas memiliki peran ganda yang sangat signifikan, yaitu sebagai informan atas dugaan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan sekaligus sebagai agen penyadartahuan masyarakat (public awareness) atas kebijakan tata kelola kelautan dan perikanan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud.

Peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui Pokmaswas perlu terus ditingkatkan dalam hal jumlah, sebaran di wilayah kepulauan maupun kualitas keterlibatannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama Pemerintah Daerah untuk menumbuhkan dan mengembangkan peran Pokmaswas melalui pendekatan yang mengedepankan kearifan lokal sehingga dapat memberi kesempatan bagi tumbuhnya kesadaran kelompok atau komunitas sebagai hasil dari interaksi mutual antara realitas lingkungan dan kearifan lokal tersebut.

Namun demikian, peran serta masyarakat secara lebih luas dalam mendukung pengawasan SDKP tidak semestinya hanya dibatasi melalui instrumen Pokmaswas. Di era industri 4.0 menuju era society 5.0 dengan berbagai salurannya menuntut dan membuka peluang partisipasi yang lebih cepat, masif dan kolaboratif. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP ini perlu terus diperluas dan dielaborasi lebih dalam melalui berbagai saluran dan pendekatan yang multi-dimensi dan multi-disiplin agar dapat memberi dampak signifikan dalam upaya memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud.

Potensi lain yang dimiliki Stasiun PSDKP Tahuna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah dalam aspek kerja sama. Stasiun PSDKP Tahuna selama ini sudah sangat aktif dan proaktif membangun kerja sama baik Pemerintah Daerah maupun instansi terkait dalam bentuk kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kegiatan operasi pengawasan gabungan.

Seluruh potensi tersebut tentu menjadi modal yang penting untuk dioptimalkan dalam rangka memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk 5 (lima) tahun ke depan.

2) Permasalahan

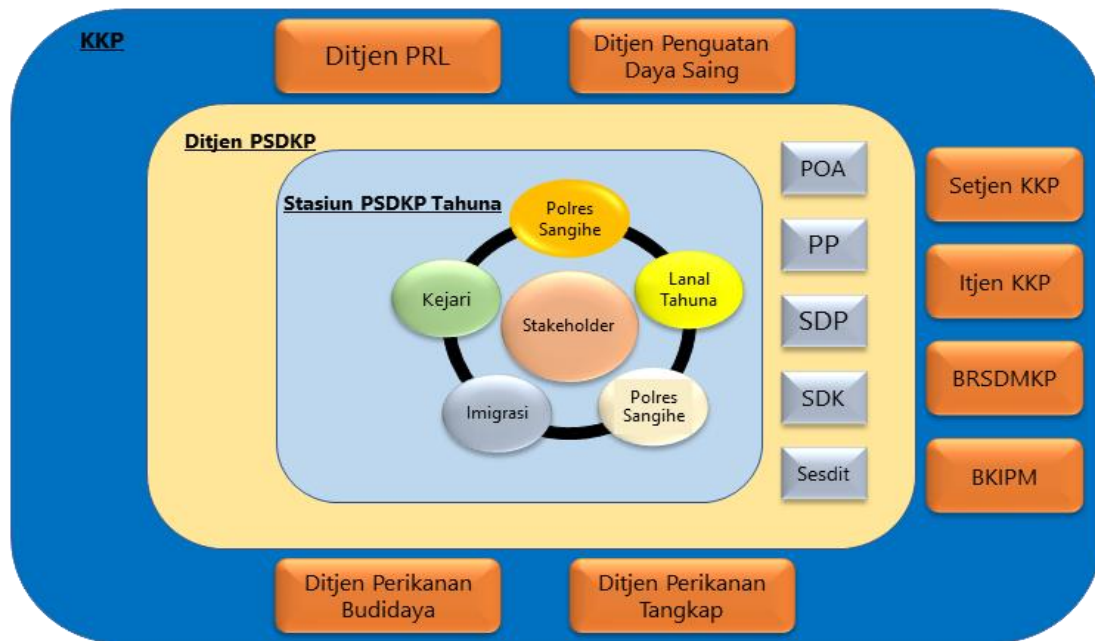
Permasalahan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tidak bisa lepas dari permasalahan sektor kelautan dan perikanan secara umum di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud. Kompleksitas permasalahan sektor kelautan dan

perikanan yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan, isu ketahanan pangan, dan ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan tentu sangat inheren dengan permasalahan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Hal ini disebabkan fungsi pengawasan merupakan aspek hilir dari proses bisnis tata kelola kelautan dan perikanan di daerah sehingga ketika terjadi permasalahan dalam aspek hulu pada tata kelola tersebut maka beban itu akan menumpuk dalam proses pengawasannya.

Sebagai gambaran umum bahwa meskipun Stasiun PSDKP Tahuna sejak dibentuk pada tahun 2017 sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Per.33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan senantiasa memiliki komitmen yang kuat dalam pemberantasan *IUU fishing* namun praktik-praktik ini masih marak terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 716 baik dalam bentuk pencurian ikan oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) Filipina maupun penangkapan ikan dengan cara merusak (*destructive fishing*) dan tidak sesuai dengan ketentuan kegiatan perikanan oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII) ditambah lagi dengan kompleksitas pemanfaatan sumber daya kelautan yang memberi dampak eksternalitas bagi sumber daya ikan dan lingkungannya. Hal ini tentu memberikan kerugian yang sangat nyata bagi daerah baik dalam aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi.

C. Lingkungan Strategis

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan di daerah, termasuk didalamnya bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi, sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal dalam sebuah lingkungan strategis organisasi. Untuk menggambarkan secara utuh lingkungan strategis dimaksud maka perlu mengidentifikasi seluruh aktor yang terlibat.



Gambar 3. Lingkungan Strategis Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna

Dalam konteks pembangunan nasional jangka menengah, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. RPJMN 2020-2024 ini merupakan titik tolak untuk mencapai visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk mencapai hal tersebut maka ditetapkanlah visi Presiden 2020-2024 yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong yang dijabarkan ke dalam misi Presiden sebagaimana Nawacita II, yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka pelaksanaan Misi Nawacita II serta upaya pencapaian Visi Indonesia 2045, Presiden RI menetapkan 5 (lima) arahan utama yang mencakup: Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Keseluruhan hal tersebut kemudian dikombinasikan dengan pengarusutamaan 17 (tujuh belas) *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Tujuan

Pembangunan Global yang menjadi komitmen dan kesepakatan negara-negara di dunia di dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2015 sehingga menghasilkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional tahun 2020-2024 yang terdiri dari:

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
- 7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam 5 (lima) tahun ke depan, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berkontribusi pada 3 (tiga) agenda pembangunan nasional, yakni: Agenda 1 (Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas); Agenda 6 (Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim); serta Agenda 7 (Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik).

Dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi secara khusus di Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud untuk pertumbuhan yang berkualitas terdapat sasaran yang akan diwujudkan berupa meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi *stakeholder* sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan. Salah satu indikatornya adalah Persentase Kepatuhan (*Compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Kemudian untuk membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dilakukan salah satunya melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup yang didukung oleh beberapa kegiatan prioritas, diantaranya penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan proyek prioritas penguatan sistem perizinan, pengawasan, dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dan agenda nasional dalam memperkuat stabilitas (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik dilakukan salah satunya dengan menjaga stabilitas keamanan nasional yang didukung oleh kegiatan prioritas penguatan keamanan laut. Di dalam kegiatan prioritas tersebut salah satunya terdapat proyek prioritas penguatan kapasitas operasi keamanan laut dengan indikatornya adalah Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan *illegal fishing*, diantaranya:

- 1) Sistem Pemantauan SDKP yang Operasional dan Terintegrasi, dengan indikasi target

- 1 sistem sampai tahun 2024;
- 2) Operasional Kapal Pengawas Hiu 15, dengan indikasi target: 90 hari operasi (tahun 2020), 110 hari operasi (tahun 2021), 110 hari operasi (tahun 2022), 110 hari operasi (tahun 2023), dan 110 hari operasi (tahun 2024);
- 3) Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat, dengan indikasi rata-rata target: 30 hari operasi (tahun 2020 - 2024);
- 4) Speed Boat Pengawas yang dibangun, dengan indikasi target: 1 unit (tahun 2022);
- 5) Armada Pengawasan SDKP yang siap operasi, dengan indikasi target: 1 unit (2020 2024).

Untuk mewujudkan hal tersebut maka dibutuhkan kerjasama lintas sektor dan kerjasama antara Pusat dengan Daerah melalui upaya membangun kesepahaman persepsi dan cara pandang, pertukaran data dan informasi, koordinasi teknis, serta peningkatan kompetensi SDM Aparatur. Instansi yang selama ini terlibat aktif diantaranya: TNI AL (Lanal Tahuna), Kepolisian RI (Polres Kepulauan Sangihe), Kementerian Hukum dan HAM (Imigrasi Kelas II Tahuna), Kejaksaan Agung (Kejaksaan Negeri Tahuna) serta Pemerintah Daerah baik provinsi Sulawesi Utara maupun kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud. Komunikasi dan kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga perlu dibangun untuk memperkuat peran kelompok masyarakat sipil dalam ikut membantu penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di daerah ini.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

A. Visi, Misi dan Tujuan

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan RI 2020-2024 yang ditetapkan adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong” selanjutnya visi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yaitu, “Garda terdepan penjaga Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Indonesia demi terwujudnya visi KKP”.

Dalam rangka mewujudkan Visi KKP dan Direktorat Jenderal PSDKP 2020-2024, maka ditetapkan Visi Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna 2020-2024, yaitu : “Peningkatan Kualitas Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif di Stasiun PSDKP Tahuna untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggungjawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan RI”.

Misi KKP 2020-2024, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan misi KKP 2020-2024, maka ditetapkan Misi Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna sekaligus mengakomodir misi Direktorat Jenderal PSDKP 2020-2024, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas SDM Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna;
2. Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna terhadap perekonomian daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud serta perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;

3. Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna.

B. Tujuan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja

Sebagai penjabaran dari visi Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna, maka dirumuskan beberapa tujuan Stasiun PSDKP Tahuna tahun 2020-2024 yang didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna berdasarkan sasaran kegiatan dan indikator kinerja yaitu :

1. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional dan daerah melalui pencapaian sasaran kegiatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan pada wilayah kerja UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna;
2. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui pencapaian beberapa Sasaran Kegiatan, diantaranya :
 - a. Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan dengan indikator kinerja jumlah pelaku usaha kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Tahuna;
 - b. Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan dengan indikator kinerja persentase pelaku usaha perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Tahuna, sebesar 100 % di tahun 2020-2024;
 - c. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Integratif dengan sasaran kegiatan terselenggaranya pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan melalui indikator kinerja :
 - i. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan armada pengawasan; dan
 - ii. Persentase penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP, penanganan barang bukti dan awak kapal lingkup Stasiun PSDKP Tahuna.
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui pencapaian Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dengan indikator kinerja berikut ini :
 - a. Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari 80 pada tahun 2020 menjadi 85 pada tahun 2024; dan
 - b. Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP dari 88 pada tahun 2020 menjadi 90 pada tahun 2024.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Arah kebijakan dan strategi pada dasarnya merupakan hasil dari analisis potensi dan permasalahan sehingga diperoleh rumusan solusi yang penting, mendesak dan memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian Sasaran Nasional, Sasaran Strategis K/L, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan.

KKP telah merumuskan 5 (lima) Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024 yang salah satunya diamanatkan kepada Ditjen. PSDKP, yaitu: Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Di samping itu, terdapat pula arahan direktif Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Ditjen. PSDKP untuk terus menjadi garda terdepan dalam mengamankan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia melalui:

- 1) Penindakan tegas terhadap kapal perikanan asing (KIA) pelaku *illegal fishing* dan *destructive fishing*; serta
- 2) Pembinaan (penaatan) terhadap nelayan lokal.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 dan arahan direktif Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut, maka dirumuskan arah kebijakan dan rincian strategi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 pada lingkup UPT Stasiun PSDKP Tahuna, sebagai berikut:

- 1) Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dengan cara:
 - a. Membangun budaya kerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna;
 - b. Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur lingkup Stasiun PSDKP Tahuna;
 - c. Membangun pola karir PNS lingkup Stasiun PSDKP Tahuna;
 - d. Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur lingkup Stasiun PSDKP Tahuna.
- 2) Peningkatan kapasitas teknologi pemantauan, sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dengan cara:
 - a. Membangun sarana pengawasan (kapal pengawas, speed boat dan sarana pengawasan lainnya) lingkup Stasiun PSDKP Tahuna;
 - b. Membangun prasarana pengawasan yang memadai di wilayah kerja Stasiun PSDKP Tahuna;

- c. Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasional lingkup Stasiun PSDKP Tahuna;
 - d. Mengembangkan kelembagaan pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna.
- 3) Penguatan sinergi dengan penegak hukum (TNI AL, POLRI, Bakamla dan Instansi terkait lainnya), dengan cara:
- a. Operasi bersama pengawasan di laut dan di darat (TNI AL, POLRI, Bakamla, Bea Cukai, KLHK) di wilayah kerja Stasiun PSDKP Tahuna;
 - b. Pertukaran data/informasi (intelijen, operasi) di wilayah kerja Stasiun PSDKP Tahuna;
 - c. Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna;
 - d. Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna;
 - e. Forum koordinasi tindak pidana perikanan (TNI AL, POLRI, Bakamla dan Kejaksaan Agung) di wilayah kerja Stasiun PSDKP Tahuna.
- 4) Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Tahuna, dengan cara:
- a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di wilayah kerja Stasiun PSDKP Tahuna;
 - b. Memelihara komitmen bersama dengan stakeholder terkait di wilayah kerja Stasiun PSDKP Tahuna dalam pemberantasan IUU fishing;
 - c. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (preventif), pembinaan, penegakan hukum dengan pendekatan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*) di wilayah kerja Stasiun PSDKP Tahuna;
 - d. Menerapkan metode auditing dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Tahuna.
- 5) Peningkatan kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dengan cara:
- a. Meningkatkan kesadartahuan masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab lingkup Stasiun PSDKP Tahuna;
 - b. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain di wilayah kerja Stasiun PSDKP Tahuna;
 - c. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS lingkup Stasiun PSDKP Tahuna;
 - d. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui “PSDKP Mengajar” di wilayah kerja Stasiun PSDKP Tahuna;
 - e. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui “Pemuda Pelopor Pengawasan” lingkup Stasiun PSDKP Tahuna;
 - f. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar di wilayah kerja Stasiun PSDKP Tahuna.

B. Kebijakan Pengarusutamaan

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) di dalam dokumen Renstra Stasiun PSDKP Tahuna 2020- 2024 merupakan suatu bentuk upaya inovatif-adaptif di dalam penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi katalis untuk mempercepat pencapaian target sekaligus memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, terdapat 4 (empat) pengarusutamaan, yaitu:

a. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

TPB/SDGs mencakup 17 Tujuan / Goal, 169 target, dan 241 indikator. Dalam melaksanakan TPB / SDGs, diperlukan keterkaitan antardimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna mendukung upaya Ditjen. PSDKP dalam memperkuat komitmen pelaksanaan target TPB 14 Ekosistem Lautan (*Life Below Water*). Pada tujuan (goal) ke-14 ini terdapat indikator yang harus dipenuhi dan dicapai oleh seluruh negara di dunia yang terkait dengan perang terhadap *IUU fishing* (indikator global yang perlu dikembangkan) dan peningkatan persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (indikator nasional sebagai proksi indikator global yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).

Demikian pula dengan upaya Ditjen. PSDKP yang didukung oleh Unit Pelaksana Teknis yang ada, senantiasa berkomitmen dalam agenda memerangi *IUU fishing* sambil terus mengembangkan secara simultan indikator-indikator yang esensial dan operasional di lapangan. Berkaitan dengan indikator persentase kepatuhan pelaku usaha dan perikanan yang sudah tercantum baik di dalam RPJMN 2020-2024 maupun Renstra KKP 2020-2024, Ditjen. PSDKP dan Stasiun PSDKP Tahuna akan mengadopsi langsung sebagai indikator kinerja utama pada level program yang secara simultan terus melakukan pengembangan dalam hal metode pemeriksaan kepatuhan maupun metode pengukurannya sehingga dapat menggambarkan kondisi kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang sebenarnya.

b. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, melalui strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di semua bidang pembangunan di tingkat pusat, dan daerah, yang mencakup: (a) Penguatan 7 prasyarat PUG: komitmen,

kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, partisipasi masyarakat di wilayah kerja Stasiun PSDKP Tahuna (b) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); (c) Penyusunan roadmap PUG; (d) Pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi pada lingkup Stasiun PSDKP Tahuna; (e) Pembuatan profil gender; (f) Monitoring dan evaluasi serta pengawasan Pengarusutamaan Gender (PUG) lingkup Stasiun PSDKP Tahuna.

c. Pendekatan Sosial Budaya

Pendekatan sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional serta daerah di wilayah kerja Stasiun PSDKP Tahuna. Pengarusutamaan sosial- budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap individu maupun kelompok memperoleh perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup Ditjen. PSDKP serta di wilayah kerja masing-masing Unit Pelaksana Teknis, diantaranya adalah (1) Pelaksanaan penyadartahuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab senantiasa memperhatikan nilai budaya, kearifan lokal dan keragaman SDA hayati di wilayah kerja Stasiun PSDKP Tahuna, (2), Penumbuhan partisipasi masyarakat dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara inklusif dan terbuka lingkup Stasiun PSDKP Tahuna (3) Pengembangan dan penguatan budaya kerja serta budaya organisasi lingkup Ditjen. PSDKP dilakukan secara kolektif, adaptif, dan inovatif menggunakan berbagai pendekatan yang efektif dalam menjawab tantangan kompleksitas permasalahan pada lingkungan strategis

d. Transformasi Digital

Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarustamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan *big data*. Optimalisasi teknologi digital sebagai salah satu arus utama pada lingkup Ditjen. PSDKP dilakukan melalui: (1) Optimalisasi peranan Pusat Pengendalian (Pusdal) Ditjen. PSDKP dalam mengintegrasikan berbagai teknologi pemantauan jarak jauh terhadap seluruh aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menghasilkan informasi yang cepat dan akurat dalam mendukung setiap operasi pengawasan, (2) Pengembangan sistem

pengelolaan data pengawasan sumber daya kelautan berbasis digital, (3) Pemanfaatan *Information Technology Forensic* (teknologi forensik digital) dan *inteleigent open source* untuk pengembangan kasus tindak pidana kelautan dan perikanan (TPKP).

C. Kerangka Regulasi Dan Kelembagaan

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 terlebih khusus lingkup Stasiun PSDKP Tahuna, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan organisasi internal untuk memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku sumber daya manusia dan aparatur lingkup Stasiun PSDKP Tahuna.

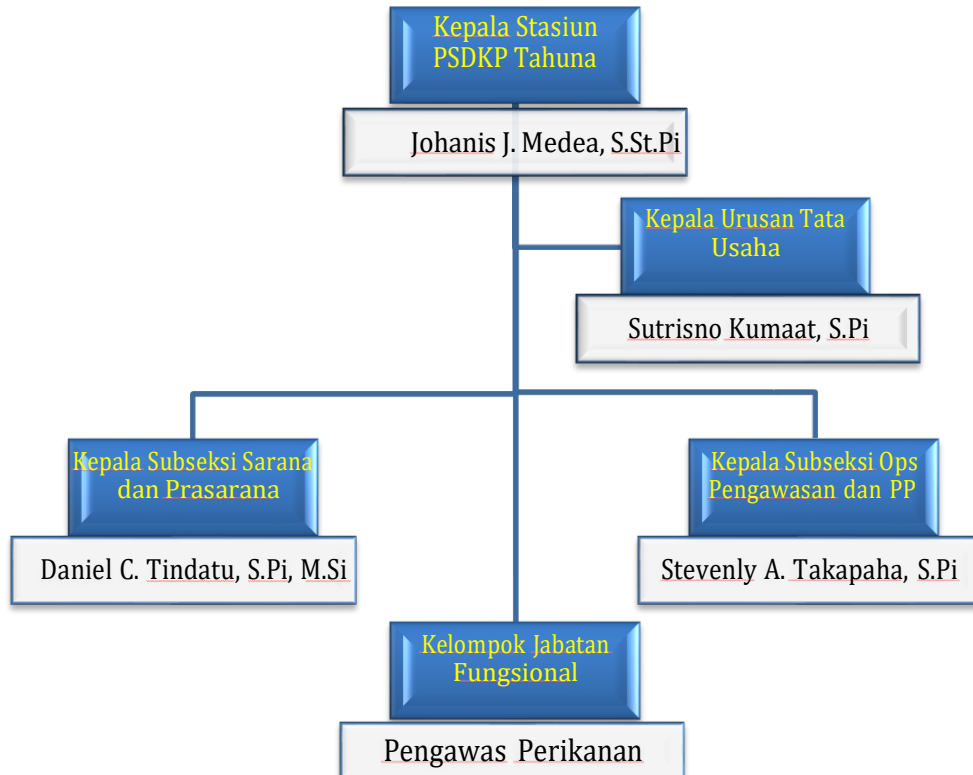
Bahwa penyusunan program regulasi dan peraturan di lingkungan Stasiun PSDKP Tahuna disusun berdasarkan kebutuhan strategis Stasiun PSDKP Tahuna dalam rangka pelaksanaan visi dan misi Stasiun PSDKP Tahuna.

Adapun mekanisme pelaksanaan dari penyusunan regulasi dan peraturan tersebut, yaitu setiap rancangan peraturan yang berdampak kepada sumber daya manusia dan aparatur lingkup Stasiun PSDKP Tahuna, terlebih dahulu harus disosialisasikan secara internal guna mendapatkan masukan/tanggapan.

Rincian kerangka regulasi dan peraturan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna tahun 2020-2024 sebagaimana dijabarkan pada Lampiran 1.

Kerangka kelembagaan yang dimaksud merupakan perangkat Stasiun PSDKP Tahuna (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsi Stasiun PSDKP Tahuna yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, struktur organisasi Stasiun PSDKP Tahuna disajikan dalam Gambar 3.

Kerangka kelembagaan dalam Renstra Stasiun PSDKP Tahuna tahun 2020-2024 difokuskan untuk melaksanakan program/kegiatan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.



Gambar 4. Kerangka Kelembagaan Stasiun PSDKP Tahuna

UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna membawahi 1 (satu) Satuan Pengawasan (Satwas) dan 3 (tiga) Wilayah Kerja (Wilker) yang merupakan 1 (satu) wilayah Provinsi Sulawesi Utara, penempatan UPT Stasiun PSDKP Tahuna adalah merupakan suatu jawaban kebutuhan Pengawasan SDKP di wilayah perbatasan yang rawan dilalui kapal-kapal asing, khususnya dari Filipina.

BAB IV

INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Indikator Kinerja Program

Sebagai pengejawatahan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Ditjen PSDKP tahun 2020-2024 yang dijembatani oleh Arah Kebijakan, Strategi, dan Pengarusutamaan (*mainstreaming*) serta Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Ditjen PSDKP tahun 2020-2024 maka disusunlah Kerangka Kinerja dan Pendanaan Ditjen PSDKP tahun 2020-2024. Berdasarkan rumusan Program dan Sasaran Program Ditjen PSDKP pada Bab 2, Ditjen PSDKP berkontribusi pada 1 (satu) program teknis dan 1 (satu) program generik. Program Teknis adalah instrumen kebijakan teknis yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal) yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi KKP dalam periode waktu jangka menengah (5 tahun) yang bersifat indikatif. Sedangkan Program Generik adalah program yang bersifat pelayanan internal untuk menunjang pelaksanaan Program Teknis. Selanjutnya, untuk mengukur sejauh mana program-program tersebut efektif bekerja, maka dirumuskan Indikator Kinerja Program sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Program (*outcome*). Pada Indikator Kinerja Program tersebut ditetapkan pula satuan dan indikasi targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana dijabarkan pada Tabel 4

Tabel 4. Indikator Kinerja Program Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024

NO	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Program : Pengelolaan Perikanan dan Kelautan						
1.	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat					
	Tingkat partisipasi Pokmaswas dalam mendukung pengawasan SDKP (%)	85	86	87	88	90
2.	Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat					
	Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan (%)	94	95	96	97	98

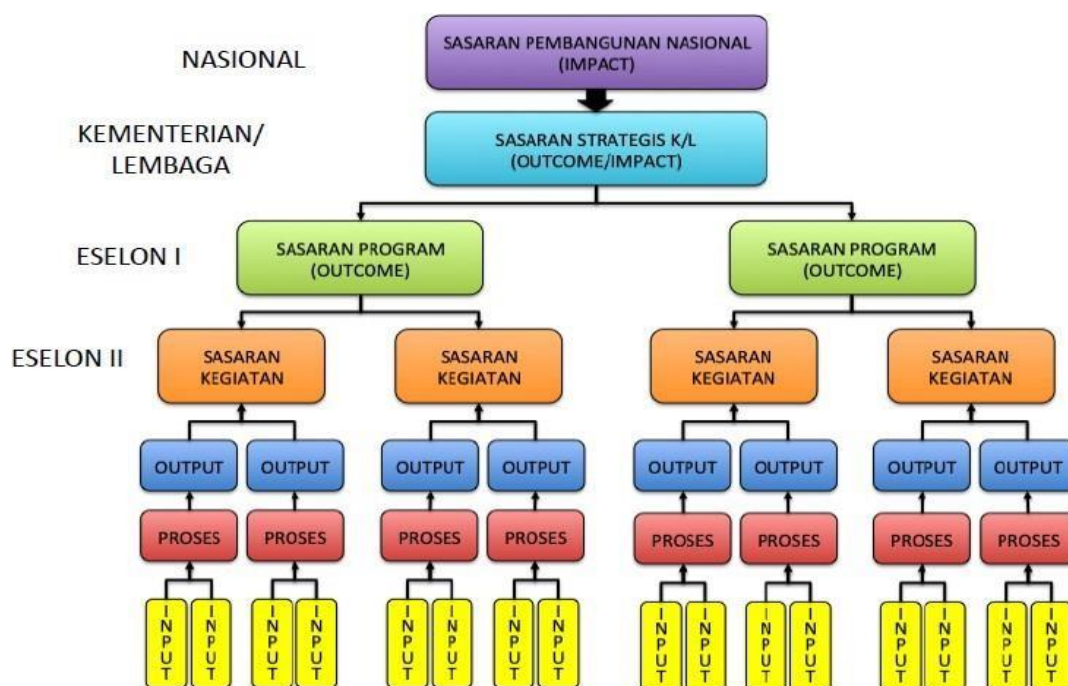
NO	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
3.	Pemantauan dan Operasi Armada efektif					
	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing (%)	54,18	60	65	70	75
	Indeks kinerja Operasi Armada Pengawasan SDKP (indeks)	86,72	87	87,5	88	89
4.	Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas					
	Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan (%)	93	93	93	93	93
Program : Dukungan Manajemen						
5.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP					
	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	30	31	32	33	34
	Unit kerja Ditjen PSDKP berpredikat menuju WBK (unit)	4	5	6	7	8
	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPSDKP (%)	1	1	1	1	1
	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	72	73	74	75	76
	Nilai PMSAKIP Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	87,00	87,15	87,25	87,50	87,75
	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)	1	1	1	1	1
	Level maturitas SPIP lingkup Ditjen PSDKP (level)	3	3	3	3	3
	Persentase unit kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PSDKP (%)	60	65	70	75	80
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (indeks)	88	89	89	90	90

NO	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	85	86	87	88	89

B. Indikator Kinerja Kegiatan

Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan bagian dari program yang akan dilaksanakan oleh unit Eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya sebagai *input* untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan Ditjen PSDKP terdiri dari 4 (empat) kegiatan teknis dan 1 (satu) kegiatan generik, yaitu: (1). Kegiatan Pemantauan dan Operasi Armada; (2). Kegiatan Penanganan Pelanggaran; (3). Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan; (4). Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan; dan (5). Kegiatan Dukungan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP (generik).

Setiap Kegiatan tersebut memiliki Sasaran Kegiatan yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) untuk mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan yang dilengkapi oleh Indikator Kinerja Kegiatan. Satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa dalam struktur hubungan kerangka logis, Sasaran Kegiatan tidak sama dengan dengan keluaran (*output*) kegiatan sebagaimana dijabarkan pada Gambar 6. Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menjadi ukuran keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan jangka waktu 5 (lima) tahun disertai indikasi pendanaannya sebagaimana Lampiran 2.



Gambar 5 Indikator Kinerja Kegiatan

C. Output Kegiatan dan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L Tahun 2020-2024, ruang lingkup penjabaran Renstra K/L sebenarnya hanya sampai pada level kegiatan, sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan serta indikasi pendanaannya namun demikian dalam rangka pemenuhan ketentuan aplikasi KRISNA RENSTRA BAPPENAS sebagai panduan bagi referensi penyusunan RENJA (Rencana Kerja) K/L untuk setiap tahun anggaran maka disusunlah indikasi output kegiatan beserta target volume dan pendanaannya dalam sebuah matriks sebagaimana Lampiran 3.

Komposisi output kegiatan serta disain arsitektur kinerja dan anggaran ini dapat berubah menyesuaikan dengan arah kebijakan prioritas tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada setiap tahun anggaran serta ketentuan lain yang berlaku secara nasional, seperti rencana redisain sistem penganggaran (RSP) dan lain-lain. Oleh karena itu, akan sangat mungkin terjadi perbedaan antara dokumen Renstra Ditjen PSDKP tahun 2020-2024 dengan dokumen RENJA K/L bahkan dengan DIPA RKA- K/L di dalam perjalanan selama 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi akuntabilitas kinerja Ditjen PSDKP sebagai bagian dari upaya pemenuhan terhadap ketentuan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Stasiun PSDKP Tahuna tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan, yang disusun untuk menjabarkan secara teknis Rencana Strategis Ditjen PSDKP dan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020), sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024

Rencana Strategis Stasiun PSDKP Tahuna 2020-2024 ini menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Rencana Kerja (Renja) Stasiun PSDKP Tahuna dan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan sub bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada periode 2020-2024, serta akan dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Stasiun PSDKP Tahuna tahun 2020-2024 ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan juga dihasilkan berkat adanya dukungan seluruh *stakeholders* dari sektor terkait lainnya serta masyarakat secara luas. Kerja keras dari seluruh jajaran aparatur Stasiun PSDKP Tahuna, Direktorat Jenderal PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka menciptakan Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

**Kepala Stasiun Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna**



The image shows a circular official stamp of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Directorate General of PSDKP, Tahuna Station. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name and NIP of the official are printed.

Johanis J. Medea, S.St.Pi
NIP. 19850701. 200901 1 002

LAMPIRAN

1. MATRIKS KERANGKA REGULASI

No.	Kebutuhan Regulasi / Peraturan	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit / Instansi Terkait	Target Penyelesaian
1.	Penugasan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna	Kelancaran administrasi penyelenggaraan kegiatan pada satuan kerja Stasiun PSDKP Tahuna	Stasiun PSDKP Tahuna	KPPN Tahuna	Setiap Tahun
2.	Pembagian Tugas Pegawai di Stasiun PSDKP Tahuna	- dalam rangka penataan organisasi dan tata kerja serta optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; - amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Stasiun PSDKP Tahuna	Pemerintah Daerah, Kejaksaan Negeri, Kepolisian Resort Kepulauan Sangihe, Pelabuhan Kelas II Tahuna,	Setiap Tahun
3.	Penugasan Tim Penanganan Pengaduan Stasiun PSDKP Tahuna	- dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Publik; - peningkatan kualitas pelayanan publik	Stasiun PSDKP Tahuna	Lembaga Ombudsman dan stakeholder di wilayah kerja Stasiun PSDKP Tahuna	2020
4.	Penunjukan Penanggungjawab Speedboat Pengawasan dan Kapal Pengawas lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	Dalam rangka pelaksanaan tugas operasional Kapal Pengawas Perikanan yang efektif dan efisien;	Stasiun PSDKP Tahuna	Stakeholder di wilayah Kerja Stasiun PSDKP Tahuna	Setiap Tahun

No.	Kebutuhan Regulasi / Peraturan	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit / Instansi Terkait	Target Penyelesaian
5.	Penugasan Tim Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi Stasiun PSDKP Tahuna	- Amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.	Stasiun PSDKP Tahuna	Stakeholder di Wilayah Stasiun PSDKP Tahuna	2020
6.	Penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	- Mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan menjamin kelancaran serta transparansi penyelesaian kegiatan pelayanan internal dan eksternal; - Amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.	Stasiun PSDKP Tahuna	Stakeholder di Wilayah Stasiun PSDKP Tahuna	2020
7.	Penugasan Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	- Mewujudkan budaya pengendalian intern yang handal melalui kegiatan yang efisien, efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; - Amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.	Stasiun PSDKP Tahuna	Ditjen PSDKP	2020

No.	Kebutuhan Regulasi / Peraturan	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit / Instansi Terkait	Target Penyelesaian
8.	Penugasan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	- Dalam rangka efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan percepatan pencapaian sasaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi; - Amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kementerian / Lembaga dan Pemerintah.	Stasiun PSDKP Tahuna	Ditjen PSDKP	2020
9.	Penugasan Tim Pengendalian Gratifikasi Stasiun PSDKP Tahuna	- Untuk pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui Gratifikasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; - Amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 44/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Stasiun PSDKP Tahuna	Ditjen PSDKP	2020

2. MATRIKS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN STASIUN PSDKP TAHUNA TAHUN 2020-2024

PROG / KEG	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					Lokasi	Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Program: Pengelolaan Perikanan dan Kelautan													
Kegiatan: Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan													Subseksi Sarpras
	Terselenggaranya tindak lanjut atas laporan pengaduan Pokmaswas												
	Persentase tindak lanjut atas laporan pengaduan Pokmaswas lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]	70	70	73	73	75	12.600	6.600					
	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP												
	Jumlah Bangunan/Pos Pengawasan yang dibangun	-	1	1	-	-	177.900	5.264.990					
	Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan Speedboat / Rigid Inflatable Boat / Rubber Boat												
	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional speedboat / Rigid Inflatable Boat / Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	351.550	567.090					
	Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan kapal pengawas												
	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]	1,51	1,51	1,53	1,53	1,55	5.241.513	6.509.977					
	Terselenggaranya Pemantauan SDKP melalui Sistem Pemantauan Kapal Perikanan												
	Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP [%]	70	70	70	70	70	88.000	92.000					
	Terselenggaranya perawatan kapal pengawas												
	Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [unit]	1	1	1	1	1	1.558.487						
	Terselenggaranya perawatan speedboat pengawas												

PROG / KEG	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					Lokasi	Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<i>Jumlah speedboat pengawas yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [unit]</i>	2	2	2	2	2							
	Terselenggaranya Operasi Kapal Pengawas												
	<i>Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas [unit]</i>	90	130	130	130	130							
	<i>Jumlah hari operasi kapal pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan IUU Fishing dan merusak SDKP di WPPNRI [hari]</i>	90	130	130	130	130							
	Terselenggaranya Operasi speed boat Pengawas												
	<i>Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan speedboat pengawas [unit]</i>	60	70	70	70	70							
	<i>Jumlah hari operasi speed boat / rigid inflatable boat / rubber boat lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [hari]</i>	60	70	70	70	70							
	Tersedianya awak kapal pengawas yang memenuhi kualifikasi kesehatan												
	<i>Jumlah awak kapal pengawas perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [orang]</i>	13	13	13	13	13							
Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan													Subseksi Ops Pengawasan dan PP
	Terselenggaranya Penyidikan TPKP												
	<i>Persentase penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]</i>	100	100	100	100	100							
	Terselenggaranya Penanganan Barbuk dan Awak Kapal												
	<i>Persentase penyelesaian penanganan barbuk lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]</i>	93	93	93	93	93							
	<i>Persentase penyelesaian penanganan awak kapal lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]</i>	93	93	93	93	93							
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan													Subseksi Ops Pengawasan dan PP
	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan												

PROG / KEG	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					Lokasi	Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<i>Jumlah Pelaku usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [pelaku usaha]</i>	7	13	13	15	15							
	<i>Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]</i>	-	95	95	95	95							
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan							15.1	16.9	18.9	20.8	22.7		Subseksi Ops Pengawasan dan PP
	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan												
	<i>Persentase pelaku usaha perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]</i>	100	100	100	100	100							
Program: Dukungan Manajemen													Subseksi Urusan Tata Usaha
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya													
	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Stasiun PSDKP Tahuna												
	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [indeks]</i>	80	80	82	82	84							
	<i>Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [indeks]</i>	72	72	73	73	74							
	<i>Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar [%]</i>	82	84	86	88	90							
	<i>Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [nilai]</i>	90	90	90	90	90							
	<i>Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]</i>	-	72,5	72,5	72,5	72,5							
	<i>Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang / Jasa lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]</i>	-	72,5	72,5	72,5	72,5							
	<i>Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [indeks]</i>	88	88	89	89	90							
	<i>Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]</i>	100	100	100	100	100							
	<i>Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana internal lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]</i>	100	100	100	100	100							

PROG / KEG	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					Lokasi	Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<i>Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [%]</i>	100	100	100	100	100							

3. MATRIKS OUTPUT KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN STASIUN PSDKP TAHUNA TAHUN 2020-2024

PROG / KEG	OUTPUT / INDIKATOR / SUB OUTPUT	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					Lokasi	Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Program: Pengelolaan Perikanan dan Kelautan													
Kegiatan: Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan													
	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP												
	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas yang dibina dalam membantu Pengawasan SDKP (kelompok)												
	<i>Kelompok Masyarakat Pengawas yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP</i>	1	1	2	2	2							
	Bangunan / Pos Pengawasan yang dibangun												
	Jumlah bangunan / pos pengawasan yang dibangun												
	<i>Bangunan / Pos Pengawasan yang dibangun</i>	-	1	1	-	-							
	Cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing												
	Cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing												
	<i>Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing [%]</i>	1,58	1,60	1,62	1,62	1,64							
	Sistem Pemantauan SDKP yang operasional dan terintegrasi												
	Jumlah sistem pemantauan SDKP yang operasional dan terintegrasi												
	<i>Sistem Pemantauan SDKP yang Operasional dan Terintegrasi</i>	1	1	1	1	1							

PROG / KEG	OUTPUT / INDIKATOR / SUB OUTPUT	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					Lokasi	Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Armada Pengawasan yang Siap Operasi												
	Jumlah armada pengawasan yang siap operasi (unit)												
	<i>Kapal Pengawas yang siap operasi</i>	1	1	1	1	1							
	<i>Speedboat / Rigid Inflatable Boat / Rubber Boat yang siap operasi</i>	2	2	2	2	2							
	Operasional Kapal Pengawas												
	Jumlah hari operasional kapal pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan IUU Fishing dan merusak SDKP di WPPNRI (hari operasi)												
	<i>Operasional Kapal Pengawas</i>	1	1	1	1	1							
	Operasional Speed Boat / Rigid Inflatable Boat / Rubber Boat												
	Jumlah hari operasional Speedboat / Rigid Inflatable Boat / Rubber Boat (hari operasi)												
	<i>Operasional Speedboat 12 meter (bensin)</i>	30	35	35	35	35							
	<i>Operasional Speedboat 12 meter (solar)</i>	30	35	35	35	35							
	Awak Kapal Pengawas yang memenuhi kualifikasi kesehatan												
	Jumlah awak kapal pengawas yang memenuhi kualifikasi kesehatan (orang)												
	<i>Awak Kapal Pengawas yang memenuhi kualifikasi kesehatan</i>	13	13	13	13	13							
Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan													
	Perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik secara akuntabel												
	Jumlah perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik secara akuntabel (kasus)												

PROG / KEG	OUTPUT / INDIKATOR / SUB OUTPUT	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					Lokasi	Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<i>Pemberkasas perkara TPKP Mudah</i>	1	1	1	1	1							
	<i>Pemberkasas perkara TPKP Sedang</i>	1	3	3	3	3							
	Barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani secara akuntabel												
	Jumlah Barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani secara akuntabel (kasus)												
	<i>Penanganan barang bukti kapal TPKP</i>	2	4	4	4	4							
	<i>Penanganan Awak Kapal TPKP</i>	2	4	4	4	4							
	Forum Kerjasama Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan												
	Jumlah forum Koordinasi Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang terselenggara (Forum)												
	<i>Forum Kerjasama Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan</i>	-	1	1	1	1							
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan													
	Pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya												
	Jumlah pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya (pelaku usaha)												
	<i>Pelaku usaha pengelolaan produk kelautan yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan</i>	1	2	2	2	2							
	<i>Pelaku usaha pengelolaan jasa kelautan yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan</i>	1	1	2	2	2							
	Pelaku usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan destructive fishing												

PROG / KEG	OUTPUT / INDIKATOR / SUB OUTPUT	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					Lokasi	Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Jumlah pelaku usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan destructive fishing (pelaku usaha)												
	<i>Pelaku usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan Destructive Fishing</i>	5	10	10	10	10							
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan													
	Kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya												
	Jumlah kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya												
	<i>Kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya</i>	30	30	33	33	33							
	Unit usaha pengolahan hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya												
	Jumlah unit usaha pengolahan hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya												
	<i>Unit usaha pengolahan hasil perikanan yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan</i>	1	17	17	17	17							
	Unit usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya												
	Jumlah unit usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya												
	<i>Unit usaha budidaya ikan yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan</i>	14	23	23	23	23							
	Unit usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya												
	Jumlah unit usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya												

PROG / KEG	OUTPUT / INDIKATOR / SUB OUTPUT	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					Lokasi	Unit Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	<i>Unit usaha distribusi perikanan yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan</i>	1	4	4	4	4							
Program: Dukungan Manajemen													
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya													
	Layanan Dukungan Manajemen Satker												
	Jumlah layanan dukungan manajemen satker (layanan)												
	<i>Layanan dukungan manajemen satker</i>	1	1	1	1	1							
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal												
	Jumlah layanan sarana dan prasarana internal lingkup Stasiun PSDKP Tahuna												
	<i>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</i>	1	1	1	1	1							
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal												
	Jumlah layanan sarana dan prasarana internal lingkup Stasiun PSDKP Tahuna												
	<i>Layanan Perkantoran</i>	1	1	1	1	1							